UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia tahun 2011-2016. Sejak era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari pendapatan dan belanja di mana dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah pusat menyalurkan dana DAU dan DAK kepada pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah pada penelitian ini adalah belanja modal. Teknik estimasi *GMM (First Difference dan System GMM)* digunakan karena memiliki fleksibilitas dalam mengatasi kemungkinan munculnya *endogeneity bias* dalam konvergensi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi terdiri dari konvergensi sigma menjelaskan standar deviasi pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, konvergensi beta absolut dan kondisional menjelaskan pertumbuhan ekonomi antardaerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia semakin merata, di mana desentralisasi fiskal DAU dan DAK mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah daerah belum dimaksimalkan dan memberi perhatian pada belanja modal.

Kata Kunci: Desentralisasi fiskal, konvergensi pertumbuhan ekonomi, daerah tertinggal, terdepan dan terluar, GMM

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of fiscal decentralization on the convergence of economic growth in underdeveloped, frontier and outermost regions in Indonesia in 2011-2016. Since the era of fiscal decentralization, the regions have the authority to manage regional finances, including disadvantaged, leading and outermost regions in Indonesia. Regional financial management consists of income and expenditure where with the fiscal decentralization the central government distributes DAU and DAK funds to local governments. Regional government expenditure in this study is capital expenditure. The GMM (First Difference and System GMM) estimation technique is used because it has the flexibility to overcome the possibility of the emergence of endogeneity bias in the convergence of economic growth. The results of the study found that the convergence of economic growth consisting of sigma convergence explained that the standard deviation of economic growth was declining, absolute beta convergence and conditionally explained that economic growth in lagging regions, the frontier and outermost in Indonesia, has a negative influence on DAU and DAK fiscal decentralization. and significant to the level of economic growth. Capital expenditure has a positive and significant influence. This finding shows that local government revenues have not been maximized and pay attention to capital expenditure.

Keywords: Fiscal decentralization, convergence of economic growth, underdeveloped, frontier and outermost regions, GMM

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak penelitian ekonomi pembangunan yang membahas pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun negara termasuk di Indonesia. Penelitian pertumbuhan ekonomi menarik, terutama membahas antara petumbuhan daerah yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang masih relatif rendah, di mana setiap negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konvergensi pertumbuhan ekonomi baik secara absolut maupun secara kondisional dengan memperhatikan variabel desentralisasi fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2011-2016.

Dalam konteks perekonomian, konvergensi merupakan kondisi yang menggambarkan semakin kecilnya kesenjangan atau disparitas suatu variabel antarwilayah dalam periode tertentu. Schmitt dan Starke (2011) menyatakan bahwa konvergensi menjadikan kondisi antardaerah dalam variabel tertentu akan semakin mirip. Semakin kecilnya kesenjangan tersebut dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu kesenjangan dalam hal pertumbuhan ekonomi serta kesenjangan dalam pendapatan per kapita (Barro dan Sala-i-Martin, 1992). Barro dan Sala-I-Martin (1992) serta Marques dan Soukiazis (1998) menyatakan bahwa konvergen mengandung arti terdapat hubungan negatif antara tingkat pendapatan mula-mula *(initial income)* dengan pertumbuhan ekonomi selama periode tertentu, sedangkan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

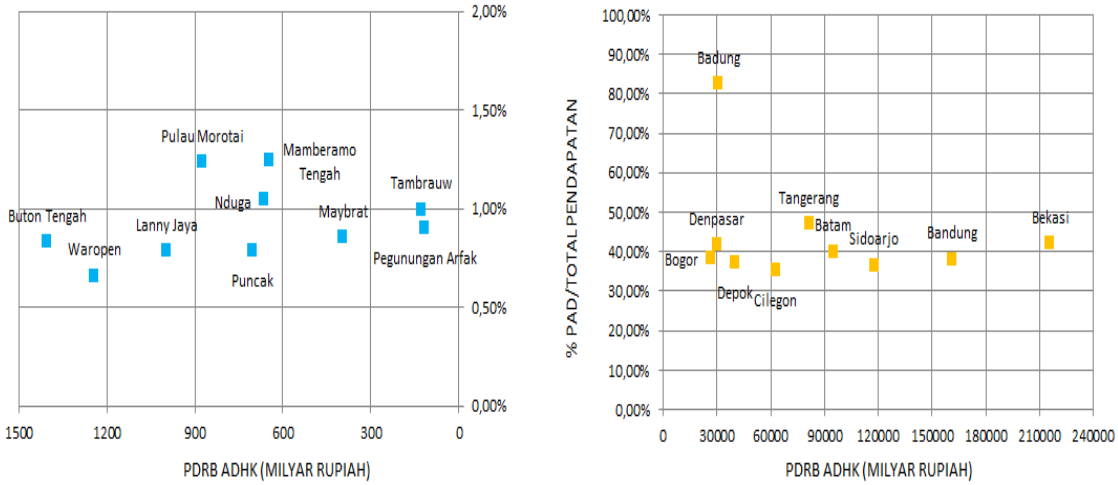
tingkat pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita. Penelitian tentang konvergensi pertumbuhan ekonomi juga disesuaikan dengan masa pemerintahan terutama kebijakan ekonomi pada periode tertentu termasuk pertumbuhan ekonomi era otonomi daerah.

Perubahan paling mendasar era otonomi daerah adalah peran daerah dalam pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi awal perubahan arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional mendorong perkembangan dan pertumbuhan pembangunan daerah (regional), dan pembangunan daerah memperkuat pembangunan nasional. Dimensi daerah (regional) menjadi penting dalam perencanaan pembangunan era otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan daerah. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, tiap daerah memiliki sektor dan komoditas unggulannya masing-masing. Peran pemerintah pusat adalah mendorong dan memfasilitasi daerah untuk mengembangkan sektor dan komoditas unggulannya melalui kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi menjadi salah satu isu kebijakan ekonomi dan politis yang masih terus diperdebatkan mulai dari pelaksanaan hingga hasil yang diharapkan. Keberagaman karakteristik wilayah di Indonesia menjadi salah satu pendorong lahirnya desentralisasi dengan tujuan setiap daerah dengan karakteristiknya mampu secara mandiri mengelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

Sebagai indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor. Akan tetapi, pada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

kenyataanya pertumbuhan ekonomi tidak selamanya diikuti pemerataan secara memadai. Perbedaan yang begitu terlihat dari kemandirian fiskal antardaerah seperti jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan dan dibandingkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan adanya ketimpangan antardaerah atau regional.



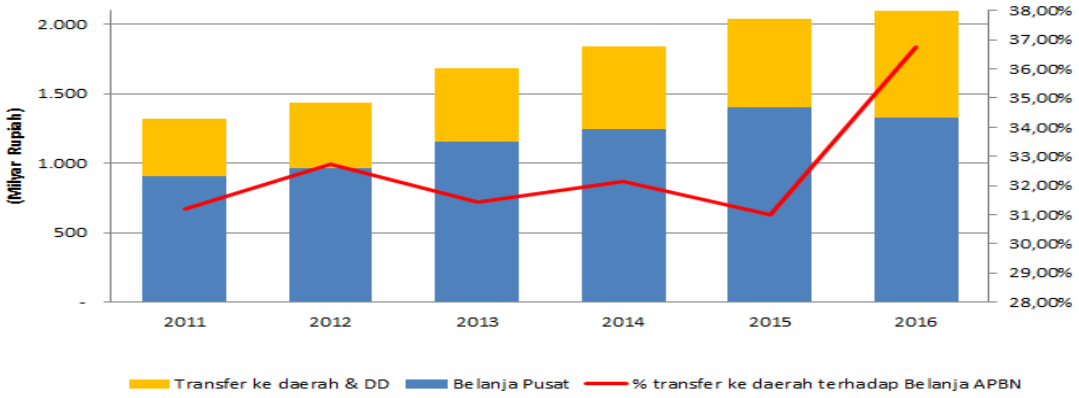
Gambar 1.1 Proporsi PAD per total pendapatan pada 10 Kabupaten/Kota terkaya dan termiskin tahun 2016 (Kementerian Keuangan dan BPS 2018)

Secara regional sejak era desentralisasi, pemerintah telah memberikan hak dan wewenang bagi setiap daerah mengelola anggaran dan belanja secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, direvisi terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi terakhir Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD) pertumbuhan ekonomi dapat terukur secara regional di setiap provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah Daerah di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan di berlakukannya otonomi daerah. Kebijakan mendekatkan pembuatan keputusan ke

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri.

Gambar 1.1 menunjukkan perbedaan kemandirian fiskal dilihat dari persentase PAD terhadap total pendapatan, di mana Kabupaten Bekasi yang memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar memiliki persentase kemandirian fiskal 41,92% dibandingkan Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terkecil memiliki persentase kemandirian fiskal 0,90%. Kabupaten/kota dengan PDRB terbesar, sebanyak 7 kabupaten/kota berada di Pulau Jawa sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB terkecil tersebar di luar Pulau Jawa. Hal ini mengindikasikan adanya perbedaan kemandirian fiskal antara daerah di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, artinya secara umum pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia berada di Pulau Jawa.



Gambar 1.2 Komponen belanja APBN berdasarkan jenis pengeluaran dan persentase transfer ke daerah terhadap total belanja periode 2011-2016 (Kementerian Keuangan 2018)

Permasalahan ketimpangan kemandirian fiskal di daerah membuat pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanahkan

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

pemerintah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangan sekaligus mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta kesenjangan pendanaan pemerintah antardaerah. Hal ini dilakukan melalui transfer Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tidak hanya berupa Dana Perimbangan, pemerintah pusat turut memberikan transfer Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian bagi beberapa daerah. Transfer antarpemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menurunkan ketimpangan layanan publik di daerah. Gambar 1.2 menunjukkan alokasi transfer ke daerah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan alokasi transfer ke daerah atau dana perimbangan tersebut tidak semerta menyelesaikan masalah ketimpangan di daerah khususnya daerah di luar Pulau Jawa.

Masalah persebaran penduduk dan ketenagakerjaan, kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat, disparitas pertumbuhan ekonomi antardaerah, dan disparitas pembangunan prasaranan dasar antardaerah menunjukkan masih adanya kesenjangan pembangunan antardaerah. Sejak tahun 2005, Pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, (KPDT) telah menetapkan 199 kabupaten yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, baik yang termasuk kategori tertinggal, parah, sangat tertinggal, maupun agak tertinggal. Dari sejumlah 199 kabupaten tertinggal, tersebut, sebanyak 123 kabupaten tersebar di Kawasan Timur Indonesia, 58 kabupaten tersebar di Pulau Sumatera, dan sebanyak 18 kabupaten tersebar di Pulau Jawa dan Bali. Penetapan kabupaten yang masuk dalam kategori tertinggal, ini dimaksudkan untuk dapat menjadi

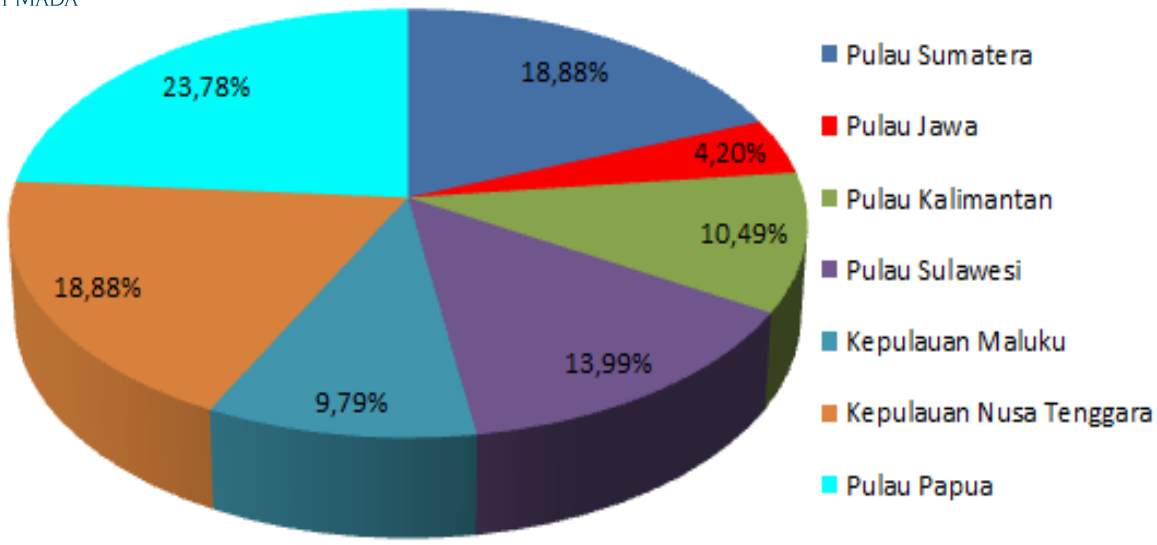
UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Surat nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan 143 daerah kabupaten/kota yang termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Penjelasan tentang daerah tertinggal, di Indonesia tertuang pada butir satu Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019, menyatakan bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal, berdasarkan kriteria:

1. perekonomian masyarakat;
2. sumber daya manusia;
3. sarana dan prasarana;
4. kemampuan keuangan daerah;
5. aksesibiltas; dan
6. karakteristik daerah.

Sejak era desentralisasi, pemerintah melalui kebijakan fiskal telah menetapkan belanja negara setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Pemerintah Daerah yang berbentuk dana perimbangan yang digunakan Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan daerah. Pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan kemandirian fiskal sehingga Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan belanja daerah dalam rangka pembangunan daerah.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



Gambar 1.3 Persentase sebaran daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia berdasarkan pulau (Kementerian PPN/Bappenas 2018)

Ketimpangan antarwilayah/regional di Indonesia terlihat pada Gambar 1.3, di mana mayoritas daerah tertinggal, terdepan dan terluar berada di luar Pulau Jawa khususnya daerah timur Indonesia. Daerah luar Pulau Jawa terbanyak 95,80% memiliki daerah tertinggal, terdepan dan terluar dengan karakteristik PDRB yang jauh lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya seperti pada Gambar 1.1, di mana mayoritas daerah dengan PDRB terkecil merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Dana perimbangan yang telah dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah sudah seharusnya dikelola dan dimanfatkan sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah dan masyarakat. Dana perimbangan tersebut juga harus dipertanggung jawabkan oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi saat ini dihadapkan dengan berbagai metode yang berusaha menyajikan masalah pertumbuhan dari berbagai sisi terbaik untuk dapat menjelaskan sekaligus menyusun kerangka kehidupan yang manusiawi melalui dua kata ‘pertumbuhan ekonomi’. Pertumbuhan ekonomi

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Barro (1992) membandingkan pertumbuhan pendapatan per kapita antara negara bagian yang terletak di sebelah selatan dan non-selatan. Hasilnya adalah pertumbuhan pendapatan per kapita di negara bagian yang terletak di sebelah selatan lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita di negara bagian non selatan. Hal ini menunjukkan terjadinya disparitas yang terjadi antara negara-negara bagian yang terletak di selatan Amerika dengan negara bagian yang tidak terletak di selatan Amerika.

Dengan melihat masalah disparitas yang terjadi, banyak ahli melakukan penelitian mengenai konvergensi pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Beberapa penelitian mengenai konvergensi yang telah dilakukan di berbagai negara memperlihatkan bahwa karakteristik awal dari sistem perekonomian suatu negara dapat menyebabkan perbedaan pertumbuhan pendapatan per kapita. Konvergensi sendiri diartikan sebagai keadaan, di mana perekonomian miskin akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian kaya, sehingga *gap* antara perekonomian miskin dan perekonomian kaya akan tererosi dalam hitungan persentase dan pada akhirnya kedua perekonomian akan bertemu pada satu titik yang sama (konvergen). Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan pertumbuhan modal yang disebut sebagai *diminishing returns to capital* dalam mahzab neoklasik. Perekonomian negara kaya secara implisit sudah mengeksploitasi modal yang mereka miliki, sehingga *returns* yang mereka terima dari modal terus berkurang,

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dan sebaliknya bagi perekonomian negara miskin. Solow dalam Model Neoklasiknya menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di dua daerah dapat berbeda karena setiap daerah memiliki jumlah modal, tenaga kerja dan efisiensi yang berbeda. Beberapa studi empiris lebih jauh menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan pertumbuhan lainnya baik untuk tingkat kabupaten maupun kota.

Beberapa peneliti melakukan penelitian konvergensi yang terjadi di beberapa negara. Konvergensi memiliki dua perspektif utama dalam alur pembahasannya. Perspektif pertama, yang berhubungan dengan konsep *β-convergence,* seperti yang dikatakan oleh Barro (1984), De Long (1988), Barro dan Sala-i Martin (1991, 1992) konvergensi dinyatakan terjadi jika perekonomian miskin tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian kaya karena perekonomian negara kaya secara implisit dapat dinyatakan telah mengeksploitasi *capital* yang dimiliki, sehingga tingkat pertumbuhan negara kaya cenderung mengalami perlambatan. Dan sebaliknya, perekonomian negara miskin secara implisit dapat dinyatakan belum mengoptimalkan penggunaan *capital*, sehingga masih bisa menikmati *return of capital stock* melebihi apa yang dapat dinikmati oleh daerah kaya dalam waktu yang sama, sedangkan perekonomian daerah miskin cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian daerah kaya. Selain itu, *β-convergence* dapat menjelaskan kecepatan konvergensi secara akurat. Perspektif kedua memfokuskan diri pada masalah dispersi antarperekonomian yang dikenal dengan konsep *σ-convergence*, seperti yang dikatakan oleh Barro dan Sala-I-Martin (1991 1992) menjelaskan bahwa

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

konvergensi terjadi jika dispersi (ukuran penyebaran) antarperekonomian semakin menurun seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, dispersi biasanya diukur melalui standar deviasi dari log PDB riil. Dengan kata lain, *σ-convergence* terfokus pada *cross-sectional dispersion* dan bersifat analisis statis.

Mengetahui eksistensi dan kecepatan konvergensi di Indonesia terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang memiliki karakteristik dan kemandirian fiskal berbeda dibandingkan daerah lainnya merupakan pembahasan yang sangat menarik bagi peneliti. Persentase transfer ke kabupaten/kota yang menunjukkan semakin besar setiap tahunnya serta kemandirian fiskal yang belum merata, sehingga diperlukan sebuah kajian apakah transfer antarpemerintah mampu menjadi komponen pertumbuhan ekonomi serta mengurangi ketimpangan fiskal dan melihat konvergensi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki ciri khas negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman sember daya di masing-masing daerah. Mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan pemerataaan pembangunan menjadi isu utama perekonomian. Untuk memaksimalkan sumber daya dan pemerataan perekonomian sistem desentralisasi diterapkan, daerah diharapkan lebih mandiri menata perekonomiannya. Desentralisasi fiskal menjadi salah satu kebijakan era otonomi daerah dalam pembangunan nasional dan daerah. Setiap daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber pendapatan pertama dalam belanja, namun masih banyak daerah yang bergantung

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

dari dana desentralisasi atau dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), di mana derajat kemandirian fiskal yang rendah (PAD per total pendapatan) terlihat di daerah luar Pulau Jawa menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang merata masih belum terwujud kemudian muncul daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) berdasarkan Surat nomor 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 tahun 2015 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2015-2019.

Pemerintah Daerah khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia melalui kebijakan desentralisasi fiskal berpeluang megoptimalkan pertumbuhan ekonominya dengan kemandirian daerah agar mencapai pemrataan pertumbuhan ekonomi. Kemandirian terlihat dari bagaimana daerah mengelola keuangan dalam hal ini dana perimbangan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) yang masih bergantung kepada dana perimbangan belum terlihat dan terukur pengaruhnya terutama konvergensi pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan bukti empiris apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan bagaimana konvergensinya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia. Berdasarkan kondisi tersebut disimpulakan perlu suatu pendekatan penelitian untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN,
DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.3 Tujuan Penlitian

1. Mengetahui konvergensi pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memperkaya dan melengkapi referensi mengenai desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
2. Menambah, melengkapi sekaligus sebagai pembanding hasil-hasil penelitian yang sudah ada menyangkut topik yang sama.
3. Sebagai referensi dan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap konvergensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2011-2016. Konvergensi yang diukur melalui indikator perekonomian sesuai teori pertumbuhan ekonomi yaitu, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, Tingkat Infrastruktur dan Pembangunan Manusia. Serta variabel yang akan menjadi pendekatan yaitu desentralisasi fiskal berupa realisasi pendapatan dan belanja modal kabupaten/kota daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR DI INDONESIA
HAVIEZ ABDILLAH, Gumilang Aryo Sahadewo, M.A., Ph.D
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun menjadi 5 bab yang disajikan sebagai berikut. Bab I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, berisi uraian mengenai landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sama dengan penelitian ini. Bab III Metode Penelitian, menjelaskan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk definisi operasional variabel yang digunakan. Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, memberikan gambaran umum dan penjelasan variabel yang diamati, hasil analisis data beserta pembahasan. Bab V Kesimpulan dan Saran, akan merangkum penemuan utama penelitian ini dan menarik kesimpulan, batasan dan implikasi kebijakan.